

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya berhubungan dengan setiap upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya-sumberdaya. Di negara-negara sedang berkembang keterbatasan sumber daya ini terutama berupa keterbatasan sumber dana untuk investasi, keterbatasan devisa dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut pilihan kebijakan yang diambil pada umumnya berfokus kepada dua aspek yaitu aspek penciptaan iklim berusaha yang kondusif terutama berupa kestabilan ekonomi makro dan aspek pengembangan infrastruktur perekonomian yang mendukung kegiatan ekonomi.

Kestabilan ekonomi makro tercermin pada harga barang dan jasa yang stabil serta nilai tukar dan suku bunga yang berada pada tingkat yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan kondisi neraca pembayaran internasional yang sehat. Sementara itu pengembangan infrastruktur perekonomian mencakup pengembangan seluruh lembaga pendukung berjalannya aktivitas ekonomi seperti sektor usaha, sektor keuangan/perbankan, perangkat hukum dan lembaga pemerintahan.

Perekonomian Indonesia mengalami perjalanan yang berfluktuasi, keadaan ini ditambah dengan krisis ekonomi yang melanda semenjak pertengahan tahun 1997 yang tidak hanya mencakup seluruh sendi kehidupan ekonomi tetapi juga

melanda pada aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut menyebabkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan semakin rendah. Turunnya kemampuan keuangan Pemerintah Pusat ini semakin didramatisir oleh kenyataan bahwa perekonomian Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk penyediaan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan investasi yang semakin meningkat, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Perubahan lain yang bersifat eksternal yang memiliki implikasi pada semua aspek kehidupan adalah globalisasi dan regionalisasi yang akan terus berkembang, karena revolusi dibidang teknologi informasi dan komunikasi, integrasi pasar uang dan modal, serta persetujuan multilateral GATT/WTO. Yang kesemuanya ini membutuhkan suatu strategi dalam kebijakan ekonomi makro dalam menghadapi kenyataan adanya persaingan di pasar internasional.

Seperti diketahui sebagai unsur permintaan aggregate, kenaikan laju investasi secara umum memiliki pengaruh dalam menaikkan output suatu negara. Sebaliknya penurunan laju investasi akan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah pemerintah berusaha secara intensif menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Investasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Investasi dapat dibagi menjadi investasi yang berasal dari dalam negeri (PMDN) dan investasi dari luar negeri (PMA). Investasi luar negeri dipengaruhi berbagai faktor antara lain nilai tukar rupiah, suku bunga dalam negeri, suku bunga luar negeri, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain faktor-faktor ekonomi tersebut juga dapat juga dipengaruhi faktor di luar

ekonomi seperti keadaan politik suatu negara, hubungan antar negara dan lain-lain sebagainya.

Pada awal pertumbuhan ekonomi suatu negara digerakkan oleh laju tingkat konsumsi masyarakat, hal ini terbukti di Indonesia pada awal pembangunan di masa orde baru. Namun tingginya tingkat konsumsi ini tidak bertahan lama dan digantikan perannya oleh investasi. Keadaan ini dapat terlihat pada gambaran tahun 1970 dimana kontribusi konsumsi masyarakat terhadap PDB berdasarkan harga berlaku masih sebesar 79,64% sedangkan investasi 14,05%. Tetapi dua puluh tahun kemudian yaitu tahun 1990 kontribusi konsumsi terhadap PDB menurun menjadi 53,77% sedangkan investasi meningkat menjadi 36,49%. (Dumairy:1999). Hal ini terjadi karena Pemerintah saat itu terus berusaha mendorong pertumbuhan investasi. Langkah ini dilatarbelakangi adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga harus mengundang calon investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Investasi di Indonesia sampai pada saat awal krisis ekonomi yaitu pada tahun 1997, mengalami pertumbuhan yang menggembirakan bahkan melebihi pertumbuhan produksi nasional. Hal ini terlihat pada tingkat perkembangan rata-rata kontribusi investasi selama Pembangunan Jangka Panjang tahap I (PJP I) terhadap produk nasional dari semula 18% menjadi 30,5%. Hal ini berarti pertanda kenaikan kapasitas produksi nasional seiring dengan hal tersebut laju pertumbuhan Indonesia selama PJP I juga meningkat menjadi rata-rata 6,82%, dan ini menurut Bank Dunia merupakan laju pertumbuhan yang terbaik diantara

negara-negara sedang berkembang (Dumairy:1999). Walaupun saat itu bentuk investasi umumnya adalah investasi yang belum memperhatikan *equity based investment*, dimana investasinya masih banyak berlandaskan pinjaman, bukan suatu penanaman modal asing dan investasi melalui pasar modal. Sementara itu prioritas investasi ditujukan pada investasi-investasi pembangunan prasarana penunjang pertumbuhan ekonomibaik di sektor transportasi, energi dan listrik, telekomunikasi dan sebagainya.

Perkembangan selanjutnya pada investasi selama PJP I menunjukkan adanya kecenderungan pada sektor sekunder, baru kemudian sektor primer. Penyebabnya diduga adalah kondisi umum sektor primer Indonesia misalnya sektor pertambangan umum merupakan kegiatan yang beresiko tinggi, sebaliknya sektor sekunder merupakan kegiatan yang beresiko ringan dan didukung dengan skala pasar domestik yang besar. Sektor sekunder yang banyak diminati investor antara lain adalah industri tekstil, kimia, barang logam, makanan, kayu kertas dan lain-lain.

Sementara itu untuk Penanaman Modal Asing, semenjak adanya UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, maka arus masuk modal asing juga terus meningkat. Isi dari UU tersebut secara singkat menyangkut :

- a. Penanam modal dibebaskan dari pajak deviden serta pajak perusahaan selama lima tahun , keringanan pajak perusahaan PMA sebesar lebih dari 50% selama lima tahun, ijin untuk menutup kerugian-kerugian perusahaan sampai periode sesudah *tax holiday*, dan pembebasan penanam modal asing dari bea import dan bahan baku.

- b. Jaminan tidak akan dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan asing dan walaupun dinasionalisasikan akan diganti rugi.
- c. Masa operasional PMA adalah 30 tahun dengan perpanjangannya tergantung pada perjanjian ulang.
- d. Keleluasaan bagi penanam modal asing untuk membawa serta atau memilih personil manajemennya dan untuk menggunakan tenaga ahli asing bagi pekerjaan yang belum biasa ditangani tenaga-tenaga Indonesia.
- e. Kebebasan untuk menransfer dalam bentuk uang semula (valuta asing) keuntungan dan dana penyusutan yang diperoleh dari penjualan saham yang disediakan bagi orang Indonesia.
- f. Sektor-sektor atau bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi modal asing yaitu meliputi pekerjaan umum, media massa, pengangkutan, prasarana serta industri pertahanan negara.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan menyangkut masalah PMA, misalnya Pakto 1993 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.20/1994 tentang pemilikan saham yang berisikan masalah tentang diperlonggarnya kepemilikan saham oleh para pemodal asing dan makin terbukanya peluang usaha di Indonesia.

Sampai dengan tahun 1994 jumlah modal asing langsung yang terrealisasi masuk ke Indonesia mencapai 3.771,2 juta dollar untuk sebanyak 392 proyek. Angka tersebut terus meningkat dan pada akhir tahun 2000 telah menjadi 9.877,4 juta dollar untuk sebanyak 638 proyek artinya selama lebih kurang 6 tahun arus modal asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia mengalami kenaikan

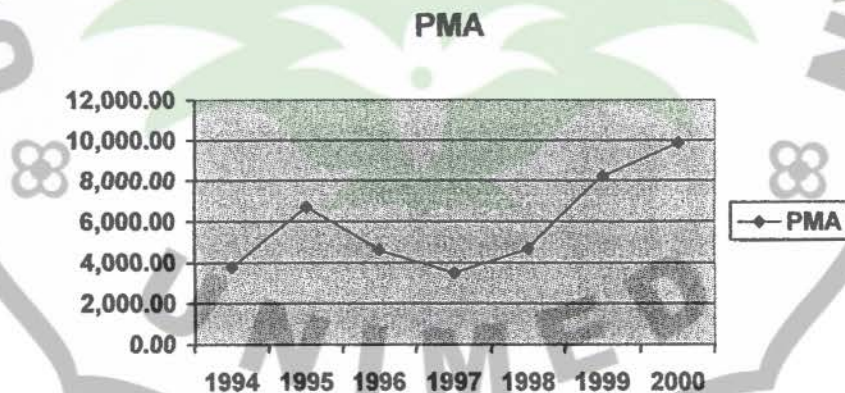
menjadi 2,5 kali lipat, dengan demikian didapatkan gambaran selama 6 tahun tersebut Indonesia menarik bagi penanaman modal asing langsung.

Untuk lebih jelasnya tentang besarnya realisasi pananaman modal asing langsung yang masuk di Indonesia pada periode tahun 1994-2000 seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel.1.1. Realisasi Perkembangan Penanaman Modal Asing Langsung

Tahun	Jumlah PMA (dalam juta US \$)	Proyek (Project)
1994	3.771,2	392
1995	6.698,4	287
1996	4.628,2	357
1997	3.473,4	331
1998	4.685,7	412
1999	8.229,9	504
2000	9.877,4	638

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI



Gambar 2.1. Realisasi Perkembangan Penanaman Modal Asing Langsung

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa modal asing menjadi kontributor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan modal asing langsung di Indonesia yang pada gilirannya menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dikarenakan adanya kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang meliputi kebijaksanaan penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal, serta peninjauan daftar negatif investasi secara berkala.

Keadaan pada masa sampai menjelang krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 penanaman modal asing langsung mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan terjadi penurunan sebesar 1.154,8 juta dollar dibandingkan jumlah penanaman modal asing langsung pada tahun 1996. Kontribusi investasi terhadap PDB pun mengalami penurunan drastis .

Tabel 1.2. Laju Inflasi, Suku Bunga dan Pertumbuhan PDB di Indonesia

Tahun	Laju Inflasi (%)	Suku Bunga Dalam Negeri (%)	Laju Pertumbuhan PDB (%)
1994	9,25	13,44	7,5
1995	8,65	13,99	8,2
1996	6,47	11,66	8,0
1997	11,05	23,25	4,7
1998	77,63	37,26	-13,2
1999	2,01	13,00	1,0
2000	9,35	14,53	4,8

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI

Menurunnya jumlah modal asing langsung yang masuk ke Indonesia ditandai pula dengan menurunnya indikator-indikator ekonomi Indonesia seperti terlihat pada tabel 1.2 salah satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 yang pertumbuhannya negatif 13,2%. Sementara itu pada tahun 1998 pula laju inflasi mencapai 77,63% sedangkan tingkat suku bunga dalam negeri naik menjadi 37,26%. Kenaikan tingkat suku bunga juga diikuti dengan tingginya laju inflasi sehingga suku bunga riil menjadi negatif. Laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor utama masuknya penanaman modal asing, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi berarti semakin meningkat permintaan modal atau investasi. Seperti pada tabel 1.2 peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring juga dengan peningkatan penanaman modal asing langsung. Pada saat terjadinya krisis ekonomi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif dan menurunkan nilai penanaman modal asing langsung, bahkan terjadi pelarian modal ke luar negeri.

Perubahan nilai tukar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keadaan makro dan usaha mikro ekonomi suatu bangsa. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dalam beberapa dekade salah satunya disebabkan oleh ketidak profesional perusahaan dalam mengelola resiko. Dengan adanya globalisasi, pasar semakin terbuka terhadap perdagangan dan teknologi, sehingga jumlah perusahaan yang terpengaruh secara langsung dan tidak langsung dengan nilai tukar semakin meningkat.

Tabel 1.3. Suku Bunga Luar Negeri dan Kurs Rupiah

Tahun	Suku Bunga Luar Negeri (%)	Kurs Rupiah terhadap Dollar
1994	7,10	2.200
1995	8,32	2.306
1996	8,27	2.383
1997	8,44	4.650
1998	8,36	8.025
1999	8,02	7.100
2000	9,27	9.595

Sumber :Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI

Pada Tabel 1.3 terlihat nilai tukar Rupiah pada tahun 1998 terdepresiasi hampir dua kali lipat. Telah terbukti secara empiris bahwa variabel ekonomi makro seperti suku bunga, nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap aliran modal.

Nilai tukar 1997, Indonesia dan sebahagian beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur mengalami krisis ekonomi, semenjak itu nilai tukar rupiah semakin sulit di prediksi dan overshoot. Walaupun fluktuasi nilai tukar rupiah sudah tidak separah beberapa tahun lalu. Pada tahun 1997-2000 misalnya, nilai tukar rupiah sempat bergerak dari Rp. 4.650 pada akhir tahun 2000 ke Rp. 9.595 per dollar. Kondisi ini menyebabkan perekonomian mengalami ketidakpastian seperti terjadinya inflasi yang berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pelemahan mata uang domestik juga memperburuk neraca keuangan perusahaan dan menurunkan kegiatan investasi .

Pengaruh kurs terhadap indeks modal sangat berkaitan erat, hal ini dikarenakan kurs adalah salah satu faktor yang mempengaruhi indeks penanaman modal. Dalam perekonomian suatu negara, biasanya dilihat dari kurs negara itu sendiri terhadap kurs valuta asing . Apabila kurs menguat, maka secara tidak langsung indeks modal juga akan naik, tetapi bila kurs itu melemah maka indeks modal juga akan turun. Naik turunnya indeks modal akan terjadi karena apresiasi rupiah terhadap mata uang asing dan menyebabkan naik turunnya permintaan modal di pasar modal oleh investor.

1.2. Perumusan Masalah

Perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dalam hal ini investasi asing termasuk salah satu sumber dana yang dapat diandalkan. Akan tetapi dilihat dari tingkat investasi yang masuk ke Indonesia terlihat mengalami fluktuasi, terutama ketika memasuki saat krisis ekonomi masuknya investasi di Indonesia mengalami penurunan yang tajam padahal pada saat yang sama dibutuhkan dana yang besar untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan kajian latar belakang diatas , perumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh suku bunga riil dalam negeri dan luar negeri, nilai tukar, laju pertumbuhan ekonomi serta laju inflasi dalam dan luar negeri terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia

2. Seberapa besarlah elastisitas suku bunga riil dalam negeri dan luar negeri, nilai tukar, laju pertumbuhan ekonomi serta inflasi dalam dan luar negeri terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) di Indonesia terutama dipandang dari segi ekonomi.
2. Untuk menganalisis seberapa besar elastisitas suku bunga riil dalam dan luar negeri, nilai tukar, laju pertumbuhan ekonomi serta inflasi dalam dan luar negeri terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran dan informasi bagi para pelaku-pelaku ekonomi, didalam penentuan kegiatan penanaman modal asing langsung.
2. Memberikan bukti empiris bagi kepentingan akademik mengenai penganalisaan nilai tukar, suku bunga dalam negeri, laju pertumbuhan ekonomi serta laju inflasi dalam dan luar negeri terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia.

3. Menambah ilmu pengetahuan dan sebagai acuan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh suku bunga riil dalam dan luar negeri, nilai tukar, laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia

